



## **KONSEP KEMAJUAN PRAKTIK KEBIJAKAN DAN KINERJA BIROKRASI PENDIDIKAN**

**Istanto**

**Ahmad Yani**

**Sofyan Tsauri**

**Sri Handayani**

[istanto@gmail.com](mailto:istanto@gmail.com)

**Universitas Islam Nusantara Bandung**

### **Abstrak**

*Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendapatkan informasi tentang konsep kemajuan praktik kebijakan dan kinerja birokrasi pendidikan. Implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responabilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politis etis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Peran birokrasi di lembaga sekolah pada akhirnya menjadi puncak model implementasi kebijakan pada satuan dan jenjang pendidikan. Di sini diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan dan jenjang pendidikan tersebut. Proses pembaharuan atau inovasi manajemen menjadi suatu keniscayaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi. Problem-problem tersebut dapat berupa usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan serta relevansi pendidikan. Tujuannya agar supaya penyebaran ide-ide inovasi yang dilakukan bisa diadopsi, dimanfaatkan dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problematika pendidikan di Indonesia.*

*Kata kunci: Kebijakan pendidikan dan Kinerja birokrasi pendidikan.*

### **PENDAHULUAN**

Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu yang dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi yang mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki rencana mengembangkan pendidikan. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan tampak dalam sumbangannya bagi proses pemerdekaan individu dalam pengembangan pribadinya.

Pendidikan merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan menjadi penentu adanya pendidikan. Kebijakan pendidikan harus didukung oleh riset dan pengembangan, serta dapat

diimplementasikan dalam mengembangkan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik memperhitungkan kemampuan dilapangan. Oleh sebab itu, pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap, serta dukungan oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat bagi kebijakan pendidikan yang efisien.<sup>1</sup>

Konsep kebijakan pendidikan di atas menjadi harapan ideal seluruh masyarakat untuk diwujudkan. Namun dalam proses implementasi masih sangat banyak hal yang harus dibenahi dan dilakukan perbaikan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah selaku aparatur negara atau birokrat dan masyarakat secara umum yang menjadi pengguna layanan kebijakan pendidikan. Karena masih ditemukan beberapa persoalan dalam praktik pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Implementasi kebijakan mengacu pada sistem pengelolaan urusan-urusan publik. Pengelolaan urusan-urusan publik diwujudkan dalam bentuk *good governance* yang memerlukan adanya reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Kunci reformasi kelembagaan ini adalah masyarakat umum (Dewan Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat misalnya sebagai stakeholders, pemerintah atau negara sebagai eksekutif dan MPRDPR/D sebagai shareholders.<sup>2</sup>

Sementara itu, reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintah yang baru atau terbaru (dinamis) yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tidak sekedar perubahan paradigma (*worldview*) namun juga perubahan manajemen/tata kelola/administratif sehingga peran birokrasi berjalan sesuai harapan.

Sebagai hajat hidup orang banyak yang nilainya sangat beragam, pendidikan dihadapkan pada berbagai masalah. Baik pada masalah pertentangan atau konflik nilai-nilai maupun masalah penyelenggaraan dan kualitasnya. Satu masalah berkaitan dengan masalah lainnya. Satu penyelesaian yang parsial berpengaruh pada timbulnya masalah pada komponen lain. Begitu rumit dan kompleksnya memecahkan masalah pendidikan bila ditangani secara parsial dan oleh kalangan terbatas.

Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangat penting keberadaannya sebagai power untuk menancapkan pengaruhnya agar pendidikan dapat dikelola dengan memenuhi harapan masyarakat sesuai agama, kepercayaan, tingkat ekonomi dan status sosial, politik, keamanan, budaya, tuntutan pekerjaan dan kemajuan, dan kepentingan pemerintah. Artinya pertimbangan dilahirkannya

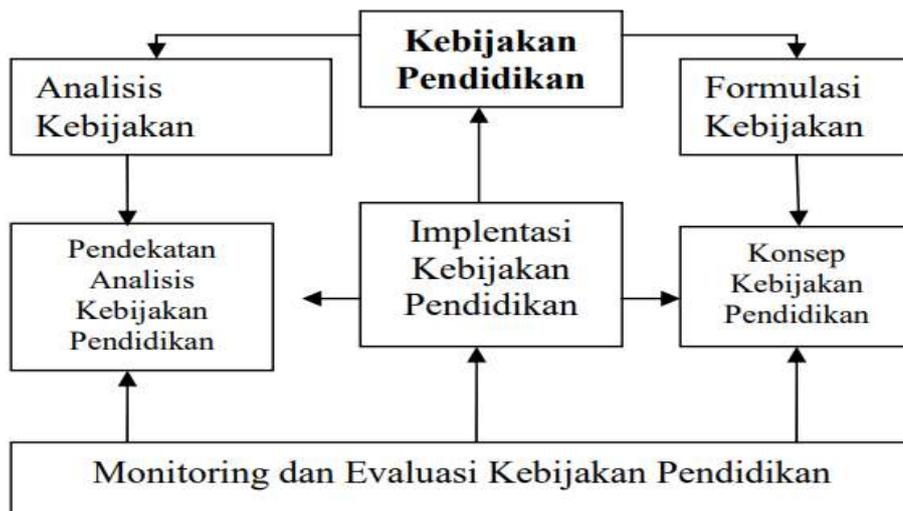
---

<sup>1</sup> A. Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).

<sup>2</sup> Erma Fatmawati, "Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat," *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management* 1, no. 1 (27 Desember 2019): h. 60.

kebijkan pendidikan haruslah memperhatikan berbagai dimensi dan persoalan-persoalan yang krusial darimasyarakat, pemerintah dan tuntutan jaman.

Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan publik dikaji dalam Studi kebijakan dapat digambarkan dalam peta konsep berikut:



Dari uraian latar belakang maka makalah ini mengemukakan pembahasan dengan judul: “Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan Dan Kinerja Birokrasi Pendidikan”.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. Pertama bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. Kedua, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang

terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak (stakeholders), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.<sup>3</sup>

## 2. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan berasal dari kata Yunani yaitu polis yang berarti kota. Kebijakan berhubungan dengan ide mengenai pengelolaan organisasi.<sup>4</sup> Lebih lanjut kebijakan merupakan suatu aktivitas formal yang diselenggarakan oleh lembaga (pemerintah) dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat dan berlaku umum.

Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.<sup>5</sup> Pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan diantaranya yaitu faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan pendidikan, faktor alat pendidikan dan faktor lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem yang sistematis yang saling berkaitan antar sub sistem.

## 3. Komponen Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu.

Ada 5 komponen kebijakan pendidikan, yaitu;

- a. *Goal* (Tujuan). Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapannya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak;

---

<sup>3</sup> Arif Rohman, *Kebijakan Pendidikan; analisis dinamika formulasi dan implementasi* (Bengkulu: Aswaja Pressindo, 2012).

<sup>4</sup> Amir Syarifudin Kiwang, David B. W. Pandie, dan Frans Gana, "Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi," *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 3 (4 September 2014).

<sup>5</sup> Hamzah Junaid, "Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional)," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 7, no. 2 (2012).

- b. *Plans* (Rencana). Setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manajemen dan penerapan kebijakan pendidikan agar proses pengimplementasiannya terarah dan jelas;
- c. *Programme* (Program). Setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan;
- d. *Decision* (Keputusan). Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak;
- e. *Efects* (Dampak). Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupan dampak priimer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.<sup>6</sup>

#### 4. Kinerja Birokrasi

Birokrasi terjadi dalam suatu organisasi (pemerintah), sementara itu dalam suatu organisasi terdiri dari individu-individu yang bekerja. Individu-individu yang bekerja itulah yang memainkan peran dalam birokrasi. Untuk itu penting juga untuk memahami motivasi karir individu dalam organisasi.

Wajah birokrasi secara umum di negeri yang sedemikian buruk tidak dapat dielakkan juga tercermin dalam birokrasi pendidikan. Birokrasi pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari birokrasi pemerintahan secara umum juga terasuki keserakahan birokrasi. Birokrasi pendidikan seperti itu keberadaannya lebih banyak merusak dari pada membangun pendidikan. Keberadaan kantor-kantor pendidikan dari tingkat kabupaten hingga ke pusat, lebih banyak menggerogoti daripada menyumbang perkembangan pendidikan.<sup>7</sup>

Di sektor pendidikan secara sengaja diciptakan birokrasi yang melelahkan. Jenjang-jenjang layanan pendidikan yang panjang dan berliku dari tingkat satuan pendidikan terendah sampai kementerian adalah bentuk birokrasi yang sangat sering dikeluhkan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui wajah birokrasi pendidikan setelah berbagai upaya reformasi birokrasi ini diupayakan.

---

<sup>6</sup> C. O. Jones, "American Politics And The Organization Of Energy Decision Making," *Annual Review of Energy* 4, no. 1 (1979).

<sup>7</sup> Rohman, *Kebijakan Pendidikan; analisis dinamika formulasi dan implementasi*, h. 126.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Kemajuan Praktik Kebijakan Birokrasi Pendidikan

Pemahaman kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dapat digali dari ciri ciri kebijakan publik. Adapun ciri kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik diantaranya adalah: a) kebijakan tersebut dibuat oleh negara/lembaga yang berkaitan dengan eksekutif, yudikatif dan legislatif b) kebijakan ditujukan untuk mengatur kehidupan bersama c) mengatur masalah bersama. Kebijakan pendidikan seringkali di dengar, dilakukan, tetapi seringkali tidak dipahami sepenuhnya. Kedua kata yaitu kebijakan dan pendidikan memiliki makna luas dan bervariasi. Kebijakan pendidikan sesungguhnya lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis merupakan kesatuan antara teori dan praktik pendidikan yang mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kebutuhan layanan pendidikan untuk mencerdaskannya. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan terdiri dari proses analisis, perumusan dan pelaksanaan serta evaluasi kebijakan.<sup>8</sup>

Kebijakan pendidikan merupakan keputusan untuk pedoman bertindak baik bersifat simple maupun rumit, umum serta khusus, baik terperinci maupun sederhana dirumuskan dengan proses politik disertai tindakan program dan rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.<sup>9</sup> Keseluruhan tahapan proses dilanjutkan hasil perumusan strategi pendidikan dijabarkan dari visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan guna mewujudkan pendidikan nasional yang unggul dalam suatu decade waktu tertentu.<sup>10</sup>

Terkait dengan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik, banyak pihak juga memahami kebijakan pendidikan sebagai kumpulan hukum atau perundang undangan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, mencakup didalamnya tujuan, proses, evaluasi dan tindak lanjut pendidikan supaya tidak terjadi benturan konflik (conflict interest) antar warga Negara dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Carter V. Good mendefinisikan:

*educational policy is judgment, derived from some system of values and some assesment of situational factors. Selanjutnya operating within institutionalized education as general plan for guiding decision regarding means of attaining desired educational objectives.*<sup>11</sup>

Mengemukakan kebijakan pendidikan sebagai proses dan hasil perumusan langkah strategis dari lembaga pendidikan dijabarkan dari visi, misi, tujuan dan sasaran pendidikan, dalam

---

<sup>8</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

<sup>9</sup> Rohman, *Kebijakan Pendidikan; analisis dinamika formulasi dan implementasi*, h. 109.

<sup>10</sup> Tilaar dan Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*.

<sup>11</sup> Carter V Good dan Phi Delta Kappa, *Dictionary of Education* (New York: McGraw-Hill, 1959), h. 18.

mewujudkan tujuan pendidikan di suatu masyarakat pada kurun waktu yang ditentukan.<sup>12</sup>

Indonesia sebagai negara hukum menitikberatkan pendidikan sebagai wahana memajukan negara. Realitasnya kebijakan demi kebijakan seperti bongkar pasang dengan dalil untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang optimal. Kenyataannya hasilnya masih jauh dari yang diharapkan stakeholder. Contoh kebijakan pengalokasian pembiayaan pendidikan 20% dari pemerintah pusat yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedakan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan dalil pengeluaran gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya yang dimasukkan sebagai dana pendidikan, maka dinilai sudah terpenuhi komitmen tersebut. Padahal sampai saat ini kondisinya masih belum 100% dapat terlaksana, bahkan kurikulum yang sering berubah-ubah, kebijakan ujian nasional dan lainnya. Inkonsistensi pemerintah dalam memutuskan beberapa kebijakan pendidikan nasional seringkali menimbulkan tanda tanya bahkan kontroversi pro dan kontra di tengah masyarakat dan dunia pendidikan. Tuntutan paling mendesak dalam meningkatkan mutu pendidikan dan relevan dengan dunia kerja yang semakin kompetitif adalah peningkatan kemampuan para pemangku kepentingan dalam melakukan analisis kebijakan pendidikan. Mereka sebagai pengambil keputusan tidak cukup hanya dengan kemampuan mengetahui dan menguasai berbagai isu dan masalah pendidikan yang relevan baik secara internal, eksternal maupun lintas sektoral. Para analisis kebijakan pendidikan dituntut untuk menguasai teknik penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan.

Kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan terlihat pada besaran alokasi dana pendidikan dalam APBN, terus mengalami peningkatan. Hal menjadi indikasi adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan jaminan tiap warga negara mendapatkan pendidikan yang memadai dan berkualitas. Namun sayangnya sebagian besar masyarakat, menganggap pendidikan bukan menjadi hal utama dalam mewujudkan kesejahteraan hidup. Selain itu pemerintah belum maksimal mengawasi pengalokasian dana pendidikan. Realitasnya masih ada kesulitan yang dialami sebagian masyarakat yang sudah menyadari akan pentingnya pendidikan, kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan pendidikan. Kondisi saat ini, pendidikan kita masih terasa mahal sebagian masyarakat yang berada pada garis kehidupan di bawah garis kemiskinan.

Akibatnya masih terdapat ketimpangan sosial antara sesama warga negara dalam mendapatkan layanan pendidikan. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, namun

---

<sup>12</sup> Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif: Teori dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

dirasakan mahal oleh sebagian masyarakat. Begitu juga pemerintah saat ini sudah melaksanakan program wajib belajar 12 tahun. Hal ini menjadi kecemasan warga masyarakat yang kurang mampu menyekolahkan anaknya dengan biaya mahal.

## **2. Konsep Kemajuan Kinerja Birokrasi Pendidikan**

Birokrasi sangatlah penting untuk kelangsungan suatu negara agar tidak terjadi kekacauan administrasi. Oleh karena itu perlu diadakan pengontrolan birokrasi penggajian dikalangan pejabat pejabat agar tidak terjadi kekacauan administrasi. Birokrasi penggajian dapat diterapkan pada pejabat negara dan pegawai negeri sipil. Tahap yang dilaksanakan pada birokrasi penggajian dibagi menjadi tiga, tahap pelaksanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi. Tahap pelaksanaan terdiri dari dua kegiatan, yaitu mengontrol keuangan, dan merencanakan birokrasi penggajian. Selanjutnya adalah tahap implementasi terdiri dari dua langkah yang perlu dilakukan adalah penerapan birokrasi penggajian, mengontrol birokrasi penggajian. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi yang dilakukan dengan cara penyebaran angket birokrasi.

Birokrasi di Indonesia hingga saat ini masih belum efektif. Para birokrat di mata publik memiliki citra buruk dan cenderung korup. Mereka tidak dapat mengikuti situasi ekonomi, sosial dan politik yang sedang berkembang yang menuntut adanya sikap dinamis dan terbuka. Waktu dan biaya yang tidak terukur adalah cermin ketidakprofesional kerja penopang birokrasi. Mereka masih melestarikan budaya birokrasi kolonial. Inilah budaya birokrasi kita saat ini yang jauh dari kesan melayani masyarakat. Perubahan kepemimpinan yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah ternyata tidak mampu mendorong reformasi yang terarah dalam memperbaiki citra pejabat birokrat dan sistem birokrasi kita.

Dalam sektor pendidikan, birokrasi juga terjadi pada level organisasi mulai dari pimpinan puncak sampai pada pejabat yang paling rendah. Dalam hal ini birokrasi dalam administrasi pendidikan baik dalam sistem pemerintahan maupun persekolahan. Sistem administrasi pendidikan khususnya pada pemerintah yang diperankan oleh Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah provinsi yang diperankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang diperankan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta satuan pendidikan pada semua jenis dan jenjang yang menyelenggarakan program pembelajaran.

Secara internal, berbagai kendala yang dihadapi oleh sektor pendidikan Indonesia menjadi alasan kuat tentang perlunya melakukan reformasi sistem pendidikan nasional. Adapun kendala-kendala yang dimaksud antara lain adalah:

- a. Rendahnya mutu pendidikan dan tingginya angka putus sekolah
- b. Rendahnya kesadaran dan penguasaan teknologi para pelaku pendidikan sehingga belum

dimanfaatkannya secara maksimal ilmu dan teknologi bagi kemajuan pendidikan

- c. Belum terciptanya budaya belajar di kalangan masyarakat
- d. Profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang masih belum sesuai dengan tantangan peningkatan mutu.
- e. Menurunnya status kesehatan dan gizi sebagian peserta didik sebagai dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar
- f. Terjadinya gejala umum menurunnya moral, budi pekerti, dan rasa toleransi di kalangan peserta didik dan generasi muda.<sup>13</sup>

Birokrasi departemen pendidikan nasional atas nama pemerintah pusat mempunyai tugas pokok menetapkan dan mengelola standar pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 2 menyatakan pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Kebijakan standarisasi ini khususnya berkaitan dengan kurikulum dalam bentuk garis-garis besar program pengajaran (GBPP), ketenagaan yaitu menentukan persyaratan pendidikan dan pembinaan lanjutan untuk memenuhi profesionalisme kependidikan, kesiswaan pada semua jenjang dan jenis pendidikan, kelembagaan, mutu pendidikan melalui evaluasi hasil belajar, sarana dan prasarana pendidikan yang diisyaratkan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Pendapat ini sesuai dengan PP No. 25 tahun 2000 pasal 2 ayat 11 bidang pendidikan menyatakan bahwa pemerintah mempunyai kewenangan menetapkan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya.

Hal ini sejalan dengan UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Unsur-unsur penting dalam pengelolaan tersebut diberi tanggung jawab kepada pejabat birokrasi seperti sekretaris jenderal, direktorat jenderal, direktur, dan pejabat struktural lainnya, semua pejabat birokrasi dan untuk membantu menentukan kebijakan dibantu oleh lembaga penelitian dan pengembangan depdiknas. Mereka para pejabat birokrasi ini muara kebijakan dan sasaran kerjanya adalah satuan pendidikan dibawah tanggung jawab menteri. UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.

---

<sup>13</sup> Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 61.

Birokrasi pada pemerintahan provinsi yang diperankan oleh dinas pendidikan provinsi. PP No. 25 tahun 2000 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota serta kewenangan dalam bidang tertentu lainnya.

Kewenangan provinsi dalam bidang pendidikan menurut PP No. 25 tahun 2000 adalah: (1) penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu; (2) penyediaan bantuan pengadaan buku-buku taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan luar sekolah; (3) mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis; (4) pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi; (5) penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau penataran guru; (6) penyelenggaraan museum, provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional dan pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Kewenangan provinsi ini diperkuat oleh UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 3 menyatakan pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Birokrasi pada pemerintah kabupaten/kota yang diperankan dinas pendidikan kabupaten/kota. UU No.22 tahun 1999 pasal 11 ayat 1 menyatakan kewenangan daerah kabupaten dan kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan. Selanjutnya pada ayat 2 menyatakan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota antara lain bidang pendidikan dan kebudayaan.

Karena itu pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang cukup memadai dalam penyelenggaraan pendidikan di daerahnya masing-masing, khususnya menyediakan tenaga kependidikan, anggaran, dan bahan-bahan yang diperlukan sekolah. Hal ini ditegaskan kembali pada UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 50 ayat 5 menyatakan pemerintahan kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Birokrasi dalam administrasi pendidikan sebagai suatu organisasi pada semua tingkatan tersebut. Karakteristik dapat digambarkan sebagai berikut: (1) organisasinya dipengaruhi oleh spesialisasi dan pembagian tugas, (2) hierarki otoritas yang kaku dan jelas dirumuskan; (3) menitikberatkan pada penggunaan peraturan umum untuk mengontrol perilaku anggotanya; (4)

impersonalitas dalam hubungan organisasi; (5) pekerjaan dalam organisasi pendidikan didasarkan pada kompetensi teknis. Karakteristik ini memperjelas bahwa ada perbedaan yang mendasar antara organisasi pemerintah dengan organisasi sekolah mengurus pendidikan.<sup>14</sup>

Dalam dunia pendidikan, sebuah organisasi sangat diperlukan dalam rangka memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Dalam menjalankan fungsi organisasi pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik khususnya pada pendidikan di sekolah.

## **KESIMPULAN**

Konsep kemajuan praktik kebijakan dan kinerja birokrasi pendidikan, di mana birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi merupakan instrumen pembangunan pendidikan. Kekuatan birokrasi Indonesia sebetulnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jika birokrasi dijalankan dengan benar, konsisten dan bertanggung jawab, maka kualitas pendidikan akan maju.

Kebijakan pembangunan nasional secara umum adalah mensukseskan terlaksananya otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan prioritas melanjutkan peningkatan, perluasan, pemerataan, kesempatan mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Namun di sisi lain, penguasa lebih mengutamakan tujuan/target daripada proses. Ada kecenderungan yang beraroma politis di dalamnya. Di satu sisi, ada upaya untuk meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (guru) sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.

Peran birokrasi dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol pendidikan nasional merupakan fungsi birokrasi itu sendiri, mengontrol tugas pokok dan fungsi birokrasi pendidikan hingga pelaksanaan proses pendidikan di daerah supaya berjalan dengan baik. Meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang profesional, ini dilakukan untuk menghapus stigma bahwa birokrasi merupakan kelompok yang sangat sulit untuk berubah.

---

<sup>14</sup> Thomas J Sergiovanni, *The Principalsip: A Reflective Practice Perspective* (Boston: Allyn and Bacon, 1991).

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatmawati, Erma. "Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Peran Birokrasi Dan Partisipasi Masyarakat." *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management* 1, no. 1 (27 Desember 2019): 58–76.
- Good, Carter V dan Phi Delta Kappa. *Dictionary of Education*. New York: McGraw-Hill, 1959.
- Hasbullah. *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif: Teori dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Jalal, Fasli, dan Dedi Supriadi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001.
- Jones, C. O. "American Politics And The Organization Of Energy Decision Making." *Annual Review of Energy* 4, no. 1 (1979).
- Junaid, Hamzah. "Sumber, Azas dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional)." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 7, no. 2 (2012).
- Kiwang, Amir Syarifudin, David B. W. Pandie, dan Frans Gana. "Kebijakan Publik dan Efektivitas Organisasi." *Jurnal Kebijakan Publik* 5, no. 3 (4 September 2014).
- Rohman, Arif. *Kebijakan Pendidikan; analisis dinamika formulasi dan implementasi*. Bengkulu: Aswaja Pressindo, 2012.
- Rusdiana, A. *Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Sergiovanni, Thomas J. *The Principalsip: A Reflective Practice Perspective*. Boston: Allyn and Bacon, 1991.
- Tilaar, H.A.R, dan Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.